

Strategi Aisyiyah Untuk Meningkatkan Kehadiran Perempuan Dalam Politik

**Nur Azizah¹, Anisa Sopiha², Ali Maksum³, Istianah ZA⁴,
Nanda Naya Hima Hita PW⁵, Sri Suharti.⁶**

^{1,2,3,5,6} Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, 55183

⁴ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, 55183

Email: nurazizah@umy.ac.id

DOI: 10.18196/ppm.41.796

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dilakukan Tim Prodi Hubungan Internasional dan Prodi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Aisyiyah (LPPA). Sesungguhnya tujuan utama keterwakilan perempuan bukan hanya sekedar meningkatkan jumlahnya saja, tetapi kehadiran perempuan di parlemen dan eksekutif diharapkan akan berani menjadikan isu pemberdayaan perempuan dan gender mainstreaming sebagai program prioritas. Kehadiran perempuan di parlemen diharapkan dapat membuat perundang-undangan yang memahami dan mengakomodir kebutuhan perempuan. Rendahnya keterwakilan perempuan dapat sangat berbahaya, terbukti sampai dengan saat ini masih banyak Undang-undang, Rancangan Undang-undang, dan Peraturan Daerah yang diskriminatif terhadap perempuan. Target yang dituju adalah kader Aisyiyah di Jawa Barat, sehingga pengabdian masyarakat ini juga bekerjasama dengan Pengurus Wilayah Aisyiyah Jawa Barat. Hasil diskusi dalam pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa Aisyiyah melakukan serangkaian strategi untuk meningkatkan kehadiran perempuan dalam politik. Pertama, Aisyiyah membangun konsep Perempuan Islam Berkemajuan. Konsep ini menjadi sebuah norma yang mendasari kiprah kader Aisyiyah. Kedua, Aisyiyah melakukan Pendidikan politik bagi kader Aisyiyah. Ketiga, menjelang Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Legislatif, Aisyiyah melakukan serangkaian advokasi agar calon yang terpilih mengakomodir kebutuhan perempuan. Saran yang disampaikan oleh para kader ialah bahwa Aisyiyah perlu mempersiapkan kader-kader yang berpotensi untuk aktif mencalonkan diri dalam pemilihan umum, mengadakan training dan mentoring untuk para bakal calon anggota DPR, DPRD, DPD, Kepala Daerah.

Kata Kunci: Strategi Aisyiyah, Kehadiran Perempuan, Politik

PENDAHULUAN

Perilaku politik, pada intinya dapat didefinisikan sebagai perilaku yang mempengaruhi pembuatan kebijakan negara (pemerintah /eksekutif, legislatif, yudikatif) (Suharyanto, 2014). Partisipasi politik sangat penting dilakukan karena semua kebijakan pemerintah, pemerintah daerah, berbagai undang-undang dan peraturan daerah harus dipatuhi atau dilaksanakan oleh semua warga negara. Dengan demikian kebijakan pemerintah maupun peraturan perundang-undangan akan berpengaruh langsung terhadap kehidupan semua warga negara, tanpa terkecuali. Baik dia perempuan maupun laki-laki, miskin maupun kaya.

Terdapat berbagai ragam bentuk partisipasi politik, mulai dari memberikan suara dalam pemilu, ikut kampanye politik, hadir dalam Musrenbang, melakukan lobby politik, menjadi anggota partai politik, mencalonkan diri sebagai pejabat pemerintah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan lain-lain (Pemula, 2020). Perempuan masih menghadapi berbagai kendala dalam berpartisipasi politik. Faktanya, jumlah perempuan yang dapat menjadi anggota DPR, DPRD, Kepala Desa, Camat, Bupati, Gubernur dan Presiden masih sangat sedikit. Meski jumlahnya terus meningkat, tetapi tetap belum sebanding dengan jumlah populasi perempuan yang sekitar 50 persen dari penduduk Indonesia.

Tabel 1. Persentase Perempuan di Beberapa Dewan Legislatif Pusat dan Daerah dalam Pemilu 2004, 2009, 2014, dan 2019

Institution	Election 2004			Election 2009			Election 2014			Election 2019		
	Women	Total	%	Women	Total	%	Women	Total	%	Women	Total	%
DPD RI-Senate	27	128	21,1	34	132	25,76	35	132	26,51	42	136	30,88
DPR RI-H of R	65	550	11,3	101	560	18,04	97 111	560 560	17,32 19,8	118	575	20,52
DPR RI DIY District	2	8	25	1	8	12,50	2	8	25%	1	8	25
DPRD Province DIY	6	55	11	12	55	21,82	6	55	11%	9	55	16,36
DPRD Yogyakarta	7	35	20	5	40	12,50	10	40	25%	5	40	12,5
DPRD Regency Bantul	4	45	9	6	45	13,33				4	45	8
DPRD Regency Kulonprogo	4	40	10	5	40	12,50				8	40	20
DPRD Regency Sleman	3	50	6	8	50	16,00				13	50	26
DPRD Regency Gunungkidul	1	45	2	7	45	15,56				10	45	22

Meski sejak dikeluarkannya Undang-undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, dan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sudah ada ketentuan kuota serendah-rendahnya 30% keterwakilan perempuan di parlemen, demi meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik dan juga sebagai bentuk perhatian pemerintah pada persoalan kesetaraan gender dalam bidang politik. Namun, target kuota tersebut belum terpenuhi sejak hingga saat ini. (Azizah, 2014)

Di sisi lain pemikiran Muhammadiyah mendorong perempuan untuk maju bersama dengan laki-laki. Salah satu bentuk nyatanya adalah dengan lahirnya gerakan perempuan Aisyiyah. Sejak pendiriannya pada 1917, tujuan utama Aisyiyah adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat, khususnya perempuan, terhadap berbagai masalah yang ada di masyarakat. (Azizah et al., 2021)

Dalam pokok pikiran Aisyiyah, gerakan ini berkomitmen untuk menciptakan kehidupan perempuan berkemajuan dalam seluruh aspek kehidupan. Dimana Aisyiyah memaknai perempuan berkemajuan sebagai kondisi dan pikiran kehidupan perempuan yang maju dalam segala aspek tanpa mengalami hambatan dan diskriminasi, baik secara struktural maupun kultural yang berbasis pada nilai-nilai Islam berkemajuan. Gerakan ini hadir untuk menumbuhkan kesadaran di masyarakat bahwa Islam memandang perempuan setara dengan laki-laki, hal tersebut diwujudkan dengan menggalakkan penafsiran ulang terhadap pandangan yang menganggap perempuan sebagai pihak yang inferior. (Muhammadiyah, 2017)

Selain memberikan gambaran tentang pelaksanaan pengabdian masyarakat tersebut, artikel ini ingin menjabarkan tentang strategi Aisyiyah dalam meningkatkan kehadiran perempuan dalam politik, serta hambatan atau tantangan yang harus dihadapi perempuan dalam berpolitik.

METODE

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan ketertarikan kader Aisyiyah terhadap isu politik. Ketertarikan terhadap isu politik akan meningkatkan kesadaran politik para kader sehingga mereka akan berusaha menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui mekanisme politik. Karena itu pilihan metode yang digunakan adalah ceramah, sosialisasi perundang-undangan politik, terutama Undang-undang Partai Politik, Undang-undang tentang

Pemilihan Umum untuk Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten /Kota. Diskusi untuk membahas kasus atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya perempuan. Beberapa kasus yang dibahas dalam diskusi diantaranya adalah masalah tingginya angka kematian akibat Covid di Indonesia dan tingginya angka pernikahan anak di Jawa Barat.

Sehubungan dengan masih merebaknya pandemi Covid-19 maka ceramah, sosialisasi dan diskusi tidak dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka secara langsung, sehingga dilaksanakan secara online dengan sistem podcast dan menggunakan media zoom.



Gambar 1. Metode Sosialisasi Melalui Media Zoom

Antusias peserta sangat tinggi dengan melibatkan 248 peserta zoom yang berasal dari kader Aisyiyah Jawa Barat, kader Nasyiatul Aisyiyah dan para mahasiswa maupun peserta umum yang tertarik terhadap isu perempuan dalam politik.

MITRA PENGABDIAN



Gambar 2. Poster Kegiatan

Pengabdian masyarakat ini bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Aisyiyah (LPPA). Pilihan Kerjasama dilakukan dengan LPPA karena salah satu tugas LPPA adalah meningkatkan kajian tentang isu sosial dan politik, terutama yang terkait dengan perempuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai sebuah organisasi perempuan yang sudah berusia lebih dari 100 tahun Aisyiyah saat ini telah memiliki 33 Pimpinan Wilayah Aisyiyah (setingkat Propinsi), 370 Pimpinan Daerah Aisyiyah (setingkat kabupaten), 2.332 Pimpinan Cabang Aisyiyah (setingkat Kecamatan) dan 6.924

Pimpinan Ranting Aisyiyah (setingkat Kelurahan), dengan jumlah anggota lebih dari 20 juta. Selain itu, Aisyiyah juga memiliki amal usaha yang bergerak di berbagai bidang, yaitu: pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Amal usaha Aisyiyah bidang pendidikan saat ini berjumlah 4.560, terdiri dari Kelompok Bermain, Taman Pengasuhan Anak, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Tinggi. (Aisyiyah, 2021)

Dengan profil di atas, Aisyiyah merupakan sebuah organisasi perempuan dengan sumber daya manusia maupun asset ekonomi yang sangat besar. Aisyiyah akan mampu menggerakkan dan mempengaruhi anggotanya melalui berbagai cara. (Woodward, 2021). Terkait dengan strategi Aisyiyah untuk meningkatkan kehadiran perempuan dalam politik, Aisyiyah melakukan beberapa langkah berikut.

Pertama, pada tataran konsep, Aisyiyah membangun, mensosialisasikan dan menginternalisasikan konsep Perempuan Islam Berkemajuan. Pembangunan konsep ini berfungsi untuk meletakkan norma yang mendasari perilaku kader Aisyiyah. Perempuan Islam Berkemajuan merupakan sebuah konsep yang sangat progresif. Sejak pendiriannya pada 1917, tujuan utama Aisyiyah adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat, khususnya perempuan, terhadap berbagai masalah yang ada di masyarakat. Aisyiyah sengaja dibentuk sebagai basis gerakan untuk berkiprah di masyarakat, bagi bangsa dan kemajuan peradaban dunia. Misi ini hanya dapat dicapai jika perempuan berani berfikir maju, tidak terkungkung pada sekat gender yang membelenggu. (Dzuhayatin, 2009)

Keterlibatan perempuan dalam politik sebenarnya sudah menjadi salah satu usaha yang dibawa Aisyiyah sejak awal didirikan. Praktik-praktik keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan, pengambilan sikap dan inisiatif senantiasa ditunjukkan Aisyiyah di awal masa berdirinya. Salah satu contohnya adalah di tahun 1928, tahun dimana perempuan Indonesia mengadakan Kongres Wanita Indonesia (Kowani) pertama, Aisyiyah mengambil peran sebagai inisiator yang aktif terlibat dalam kongres tersebut. (Qibtiyah & Studies, 2009)

Dukungan Aisyiyah terhadap keterlibatan perempuan dalam ranah publik dan pengambilan peran strategis sebagai pemimpin sudah ditetapkan sejak tahun 1972, dimana 'Aisyiyah mengeluarkan pedoman bagi warga persyarikatan 'Aisyiyah yang bernama 'Adabul Mar'ah. Ini merupakan buku yang menjadi pedoman pada masa itu yang menjadi bentuk progresifitas Aisyiyah dalam memberikan perspektif tentang hak-hak perempuan. Dalam buku tersebut menjelaskan bahwa keimanan dan kesalehan bukan diukur dari jenis kelamin tertentu tetapi yang paling bermanfaat bagi semesta, manusia harus saling tolong-menolong dan saling membantu serta berlomba-lomba dalam kebaikan, hal ini berlaku baik bagi laki-laki maupun perempuan sebagai khalifah di bumi. Hadirnya 'Adabul Mar'ah ini berhasil memberikan otonomi terhadap perempuan tanpa batasan agama untuk menjadi pemimpin pada ranah publik, menjadi hakim di Pengadilan Agama, dan aktif berorganisasi. Meskipun demikian, 'Adabul Mar'ah tetap menyelaraskan aturan islam mengenai keluarga, dimana seorang istri yang hendak berkarir di ranah publik harus mendapatkan persetujuan dari suami sebagai bentuk negosiasi rumah tangga. (Muthmainnah, 2019)

Muhammadiyah melihat peran perempuan dalam kepemimpinan dengan menafsirkan *qiwamah* secara bahasa dimaknai sebagai fondasi yang berasal dari *kata qama* yang berarti berdiri. *Qiwamah* diartikan sebagai penanggungjawab, melalui akar kata ini Muhammadiyah mengartikan

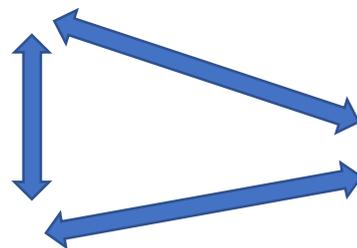
bahwa laki-laki dianggap sebagai penopang, penanggungjawab, dan pemikul dari berbagai beban atas perempuan. Laki-laki dianggap sosok yang berperan membuat suatu keluarga dapat berdiri dengan baik. Muhammadiyah cenderung memilih pemaknaan tersebut ketimbang tafsir umum dimana asumsi tafsir umum cenderung menempatkan bahwa laki-lakilah yang memiliki peran yang cakap dianggap penting. Laki-laki dianggap dapat dan lebih mampu terjun ke politik dan kepemimpinan secara publik dan tidak terikat dengan hal-hal domestik seperti selayaknya perempuan. Tafsir inilah yang kemudian diperbarui oleh Muhammadiyah dalam memandang keterlibatan perempuan di ranah public (Alauddin et al., 2021).

Menurut tafsir Muhammadiyah yaitu dari ketua Majelis Tarjih dan Tajdid, Prof. Syamsul Anwar, mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran dan tanggungjawab masing-masing. Baik tanggung jawab laki-laki dan perempuan bukanlah sesuatu yang kekuasaan atau dominasi yang cenderung menekan satu pihak dan meninggikan pihak lainnya dalam bentuk relasi kekuasaan. Kewajiban dan tanggung jawab diartikan sebagai bentuk yang diberikan kepada sang pencipta di mana perempuan hamil, melahirkan dan menyusui. Sehingga kewajiban dan tanggung jawab laki-laki melengkapinya yaitu menafkahi keluarga dan membuat keluarga dapat terus berdiri dan berjalan dengan baik (Aisyiah, 2020).

KERJA PENDUKUNG

Supporting Unit

Menyediakan data dan informasi



KERJA GARIS DEPAN

Frontline Work

Menjadi Juru Bicara, Lobby

Partisipasi Aktif dalam Proses

Pembuatan Kebijakan / Perundang-

undangan

KERJA BASIS

Ground, Underground Work

Dapur Gerakan Advokasi

Membangun Basis Massa

Pendidikan Politik Kader

Gambar 3. Model Segitiga Advokasi (Kerjasama Antar Aktor dalam Advokasi)(Azizah, 2014)

Kedua, pada tataran praktik, Aisyiah melakukan pendidikan politik bagi kader Aisyiah. Aisyiah, mengadakan sekolah politik Madrasah Perempuan Berkemajuan (MPB) untuk meningkatkan minat dan kesadaran kader-kader Aisyiah terhadap politik (Aisyiah Adakan Sekolah Politik Madrasah Pimpinan Berkemajuan *Republika Online*, n.d.)

Ketiga, Menjelang Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Legislatif, Aisyiah melakukan serangkaian advokasi agar calon yang terpilih mengakomodir kebutuhan perempuan.

Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk melakukan advokasi agar calon yang terpilih mengakomodir kebutuhan perempuan tersebut ialah:

1. Memastikan semua warga negara terdaftar sebagai pemilih dengan cara melakukan pemantauan daftar pemilih
2. Melakukan pemetaan problem-problem yang dihadapi perempuan, sehingga diketahui kebutuhan perempuan di masing-masing daerah. Setelah kebutuhan yang esensial ini diketahui maka Aisyiyah dapat memberikan masukan kepada para calon kepala daerah. Harapannya, masukan tersebut akan diakomodir dalam kampanye yang merupakan janji seorang calon kepala daerah, dan nantinya dapat diakomodir menjadi kebijakan.
3. Melakukan Pendidikan pemilih di tingkat akar rumput, melalui berbagai forum tatap muka maupun online yang diadakan aisyiyah di wilayah, daerah, dan cabang.
4. Melakukan dialog dengan calon kepala daerah atau kepala daerah terpilih untuk menyampaikan usulan kebijakan yang mengakomodir kebutuhan perempuan.
5. Pemantauan apakah ada politik uang dalam kampanye pilkada. Jika terjadi hal yang mencurigakan akan adanya pelanggaran maka Aisyiyah dapat melaporkan kecurigaan tersebut kepada pengawas pemilu.
6. Setelah kepala daerah terpilih, Aisyiyah berperan serta aktif untuk melakukan pengawalan kebijakan sehingga kebijakan kepala daerah tersebut benar-benar mengakomodir kebutuhan perempuan (*LPPA Terbitkan Infografis Pendidikan Politik, Jelang Pilkada - Berita Lembaga Penelitian Dan Pengembangan, n.d.*)



Gambar 4. Infografis yang diterbitkan LPPA dalam Rangka Pendidikan Politik, Jelang PILKADA 2017

Hambatan Perempuan di Dalam Politik

Meskipun Aisyiyah sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kehadiran perempuan di parlemen, tetapi mendorong kader Aisyiyah untuk bersedia bergabung dengan Partai Politik bukan sesuatu yang mudah. Jumlah kader Aisyiyah yang berada di partai politik relative masih sedikit. (*Aisyiyah Adakan Sekolah Politik Madrasah Pimpinan Berkemajuan | Republika Online, n.d.*)

Salah satu faktor yang menghambat kesediaan orang untuk menjadi calon anggota legeslatif atau eksekutif ialah sangat mahalnya biaya pencalonan. Dengan sistem pemilu saat ini, dimana calon terpilih ditentukan berdasar suara terbanyak, maka faktor popularitas akan sangat menentukan keterpilihan seorang calon. Biaya yang besar diperlukan untuk kampanye, untuk membiayai tim kampanye, membiayai puluhan atau ratusan orang untuk “mengawal” agar suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak dicurangi. Semakin populer seorang caleg, seperti seorang artis, presenter, MC, biaya kampanye dapat semakin ditekan. (*Ingin Jadi Caleg, Berapa Miliar Dana Dibutuhkan? Halaman All - Kompas.Com, n.d.*)

Tabel 2. Perkiraan Biaya Pencalonan Anggota DPR dan DPRD

	Bakal Calon di:	Perkiraan Biaya Minimal yang Dikeluarkan
1	DPR (Nasional)	Rp. 1 - 2 Milliar
2	DPRD Provinsi	Rp. 500 juta - 1 Milliar
4	DPRD Kabupaten/Kota	Rp. 250 - 300 Juta

Selain itu masih terdapat sejumlah hambatan lain, diantaranya:

1. Faktor budaya patriarki yang ada di masyarakat. Budaya ini menghadirkan persepsi bahwa politik merupakan arena publik dan publik adalah arena laki-laki. Oleh karena itu, anggapan yang berkembang ini kemudian mempengaruhi budaya politik perempuan yang parokial dan cenderung membatasi gerak perempuan untuk menjadi anggota parlemen.
2. Faktor proses seleksi dalam partai politik. Partai politik di Indonesia masih didominasi oleh pengaruh laki-laki. Dominasi ini juga mengisi kursi-kursi penting dalam partai politik yang mempengaruhi keputusan partai politik itu sendiri. Ketika partai politik ingin mencalonkan kandidatnya, seleksi yang dilakukan seringkali hanya pada kelompok kecil pejabat saja yang mayoritas diisi oleh laki-laki. Kesadaran gender yang masih rendah yang dimiliki para pemimpin partai kemudian membuat perempuan tidak memperoleh banyak dukungan dari partai-partai politik, akibatnya keterwakilan perempuan rendah dalam hal pencalonan pemilu.
3. Faktor media yang kurang membangun narasi mengenai pentingnya representasi perempuan dalam parlemen, padahal hal ini dapat mempengaruhi opini publik bahkan mendorong perempuan untuk memiliki motivasi terjun ke dunia politik. politik (Ballington, 2002).
4. Faktor kurangnya jaringan organisasi massa, Lembaga Swadaya Masyarakat dan partai-partai politik yang memperjuangkan keterwakilan perempuan di parlemen. Pasalnya, jaringan organisasi-organisasi perempuan di Indonesia baru memiliki peran strategis sejak runtuhnya orde baru di tahun 1999.
5. Faktor kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan perempuan yang kemudian mempengaruhi kemampuan politik perempuan, akibatnya ketika bersaing dengan laki-laki kemampuan yang tidak terasah tersebut dikalahkan oleh laki-laki yang sudah lama berkecimpung di ranah public tersebut.

6. Faktor keluarga. Keterlibatan perempuan di dalam politik memerlukan waktu dan prioritas yang tinggi serta uang yang besar, hal ini kemudian menjadi pertimbangan para suami untuk memberikan izin kepada istrinya untuk terjun ke ((CETRO), 2002)

KESIMPULAN

Hasil diskusi dalam pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa Aisyiyah melakukan serangkaian strategi untuk meningkatkan kehadiran perempuan dalam politik. Pertama, Aisyiyah membangun konsep Perempuan Islam Berkemajuan. Konsep ini menjadi sebuah norma yang mendasari kiprah kader Aisyiyah. Kedua, Aisyiyah melakukan Pendidikan politik bagi kader Aisyiyah dengan membuat program Madrasah Perempuan Berkemajuan. Ketiga, menjelang Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Legislatif, Aisyiyah melakukan serangkaian advokasi agar calon yang terpilih mengakomodir kebutuhan perempuan. Saran yang disampaikan oleh para kader ialah bahwa Aisyiyah perlu mempersiapkan kader-kader yang berpotensi untuk aktif mencalonkan diri dalam pemilihan umum, mengadakan training dan mentoring untuk para bakal calon anggota DPR, DPRD, DPD, Kepala Daerah.

Kehadiran perempuan di parlemen dan eksekutif sangat diperlukan agar mereka dapat mengakomodir kebutuhan perempuan dalam kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan Indonesia, sehingga tidak akan ada lagi peraturan pemerintah/perundang-undangan yang diskriminatif terhadap perempuan (memperlakukan/mengatur perempuan dan laki-laki secara berbeda) (Phillips, 1994).

Masyarakat Indonesia, seperti halnya di berbagai negara lainnya, sangat dihegemoni oleh norma-norma patriarkhi yang sangat membaggakan karakter - karakter maskulin. Sebaliknya karakter-karakter yang feminine dianggap rendah. Akibatnya, hal-hal yang terkait dengan urusan laki-laki cenderung dianggap penting, sebaliknya urusan-urusan (kebutuhan -kepentingan) yang terkait dengan perempuan kerap dianggap kurang penting. (Rosén Sundström & Elgström, 2020). Contoh kebutuhan/kepentingan perempuan tersebut adalah mencapai keterwakilan perempuan serendah-rendahnya 30 persen di Lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, karena perempuan merupakan warga negara yang berhak dan berkewajiban untuk memperoleh akses, partisipasi, control dan manfaat dari negara (Molyneux, 2016).

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami haturkan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, semua teman-teman anggota Lembaga Penelitian dan Pengembangan Aisyiyah (LPPA Aisyiyah) yang telah menjadi mitra dalam pengabdian ini, khususnya kepada Prof. Alimatul Qibtiyah, Ph.D., Dr. Witri, mbak Islam, mbak Dati Fatimahdan mbak Hajar, segenap pimpinan PWA Jawa Barat serta semua kader Aisyiyah yang luar biasa. Ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada semua tim pengabdian, Bp. Ali Maksum, Ph.D., Dr. Istianah. ZA., SH., Ibu Sri. Suharti, Anisa dan Hima.

DAFTAR PUSTAKA

(CETRO), C. for E. R. (2002). Data dan Fakta Keterwakilan Perempuan Indonesia di Partai Politik dan Lembaga Legislatif 1999-2001 (Ringkasan Eksekutif). In *Perempuan di Parlemen Bukan Sekedar Angka*.

- Aisyiyah Adakan Sekolah Politik Madrasah Pimpinan Berkemajuan | *Republika Online*. (n.d.). Retrieved September 26, 2021, from <https://republika.co.id/berita/koran/teraju/nowbk716/aisyiyah-adakan-sekolah-politik-madrasah-pimpinan-berkemajuan>
- Alauddin, M. A., Asyifani, K., Permata, M. A., Sosiologi, P. S., Ilmu, F., Politik, I., & Maret, S. (2021). 'Aisyiyah dan Pergerakan Politik Muslimah : Studi di Kota Surakarta pada Pemilihan Umum 2019. *13*(1), 15–28.
- Azizah, N. (2014). Advokasi Kuota Perempuan di Indonesia. *LP3M UMY & Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 32–33.
- Azizah, N., Maulana, Z., & Maksum, A. (2021). Kesetaraan Gender Sebagai Kunci Aisyiyah Berkemajuan. *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*, 805–811. <https://doi.org/10.18196/ppm.34.298>
- Dzuhayatin, S. R. (2009). Menakar “ Kadar Politis ” Aisyiyah. *Yin Yang Jurnal Studi Gender Dan Anak STAIN Purwokerto*, 4(2), 354–359.
- Ingin Jadi Caleg, Berapa Miliar Dana Dibutuhkan? *Halaman all - Kompas.com*. (n.d.). Retrieved September 26, 2021, from <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/01/064607526/ingin-jadi-caleg-berapa-miliar-dana-dibutuhkan?page=all>
- LPPA Terbitkan Infografis Pendidikan Politik, Jelang Pilkada - *Berita | Lembaga Penelitian dan Pengembangan*. (n.d.). Retrieved September 26, 2021, from <http://lpp.aisyiyah.or.id/id/berita/lppa-terbitkan-infografis-pendidikan-politik-jelang-pilkada.html>
- Molyneux, M. (2016). Mobilisation without emancipation? Women's interests, state and revolution in Nicaragua: [Http://Dx.Doi.Org/10.1177/026101838400401004](http://dx.doi.org/10.1177/026101838400401004), 4(10), 59–71. <https://doi.org/10.1177/026101838400401004>
- Muthmainnah, Y. (2019). 'Aisyiyah dan Ijtihad Berkemajuan Hak-Hak Perempuan. *Maarif*, 14(2), 114–134. <https://doi.org/10.47651/mrf.v14i2.66>
- Pemula, P. (2020). *Partisipasi politik pemilih pemula pada pilkada 2020 di kelurahan kakaskasen ii*. 1–11.
- Phillips, A. (1994). Dealing With Difference: A Politics of Ideas Or A Politics of Presence? *Constellations*, 1(1), 88–91. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8675.1994.tb00005.x>
- Qibtiyah, A., & Studies, A. (2009). *INDONESIAN MUSLIM WOMEN AND THE GENDER Alimatul Qibtiyah International Business and Asian Studies* ., 03(01), 49–58.
- Rosén Sundström, M., & Elgström, O. (2020). Praise or critique? Sweden's feminist foreign policy in the eyes of its fellow EU members. *European Politics and Society*, 21(4), 418–433. <https://doi.org/10.1080/23745118.2019.1661940>
- Suharyanto, A. (2014). Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 2(2), 151–160.
- Woodward, M. (2021). *MAKING MODERN MUSLIM WOMEN : 1*, 1–34.